

Factors Affecting Coordination in Infrastructure Development of Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency

Suherman^{1*}, Novelma Lastri², Dwi Hartutik³ Andi Desy Musdiana⁴
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Corresponding Author: Suherman suherman.mkkp@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Coordination, Development, Infrastructure

Received : 3 June

Revised : 15 June

Accepted: 20 July

©2024 Suherman, Lastri, Hartutik, Musdiana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors that influence coordination in infrastructure development in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The type of research conducted is qualitative research. Data collection using primary sources and secondary sources. The techniques used are observation, interviews, documents, for research informants, namely the District, Village Apparatus, BPD, Hamlet Head and RT. Data analysis in this research is qualitative data analysis according to Bogdan, namely the process of systematically searching and compiling data obtained from interviews, field notes, and other materials, so that it can be easily understood, and the findings can be conveyed. The results showed that there were factors that influenced coordination, namely the absence of socialization of the Vision and Mission of Kesumbo Ampai Village, operational standards had not been implemented optimally, low work discipline, the status of the Village Head who was still not definitive and development supervision was not optimal

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Suherman^{1*}, Novelma Lastri², Dwi Hartutik³, Andi Desy Musdiana⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Corresponding Author : Suherman suherman.mkkp@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Koordinasi, Pembangunan, Infrastruktur

Received : 3 June

Revised : 15 June

Accepted: 20 July

©2024 Suherman, Lastri, Hartutik, Musdiana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam pembangunan infrastruktur pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumen, untuk informan penelitian yaitu pihak Kecamatan, Aparatur Desa, BPD, Kepala Dusun dan RT. Analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif menurut Bogdan yaitu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan di lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat mudah untuk difahami, dan temuannya dapat disampaikan. Hasil penelitian menunjukkan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu tidak adanya sosialisasi Visi dan Misi Desa Kesumbo Ampai, Standar operasional belum terlaksana dengan optimal, rendahnya disiplin kerja, status Kepala Desa yang masih belum definitif dan pengawasan pembangunan belum optimal

PENDAHULUAN

Kondisi pembangunan pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis secara fisik maupun secara non fisik sudah dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan demi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat setempat. Sehingga mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama yang lain, selanjutnya yang disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah/kawasan yang berhak untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, keperluan masyarakat tempatan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat 1 UU Desa No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup manusia dan penanganan kemiskinan melalui program pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar, pembangunan sapsras Desa, pengembangan terhadap potensi ekonomi lokal, serta juga pemanfaatan dari SDM dan juga lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menjelaskan Pembangunan Desa merupakan upaya ataupun usaha untuk meningkatkan kualitas hidup yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari tahapan sebuah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan juga pengalokasian sumber daya desa demi mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa jangka waktu 6 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa penjabaran dari RPJM Desa untuk 1 tahun. Daftar Usulan RKP Desa ialah penjabaran RPJM Desa yang merupakan menjadi bagian dari RKP Desa untuk waktu selama 1 tahun yang diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang dengan nama lainnya yaitu suatu lembaga yang menjalankan fungsi dari pemerintahan yang para anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk asli Desa yang merupakan perwakilan wilayah dan ditentukan secara demokratis, melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan Musyawarah Desa disebut juga dengan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa dan juga unsur masyarakat.

Pada sebuah organisasi memerlukan adanya kegiatan koordinasi antara pimpinan dan bawahannya untuk keberlangsungan sebuah organisasi. Adanya koordinasi diharapkan mampu harmonis atau adanya keserasian bagi semua kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan diinginkan. Sehingga setiap departemen

atau organisasi atau bagian menjadi seimbang dan juga selaras (Mulyadi, 2018:267).

Aktivitas koordinasi diharapkan dapat berjalan lancar antara pihak yang terlibat terhadap rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan. Untuk itu koordinasi sangat penting didalam Musyawarah Desa karena koordinasi merupakan sebuah proses komunikasi untuk pengaturan, memadukan kepentingan untuk mencapai sebuah tujuan secara efisien dan juga secara efektif.

Desa Kesumbo Ampai merupakan sebuah Desa yang berada pada Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2004. Pada saat terbentuknya Desa Kesumbo Ampai masih berada diwilayah Kecamatan Mandau dan saat ini sudah terjadi pemekaran.

Pembangunan terdiri atas dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan secara fisik yaitu pembangunan yang dapat dirasakan langsung atau pembangunan yang terlihat oleh mata atau berwujud. Seperti pembuatan jalan, pembangunan jembatan, parit, pasar dan lain yang lainnya. Pembangunan non fisik yaitu pembangunan yang berhubungan dengan penggunaan SDM. Seperti pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Pembangunan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembangunan fisik atau juga disebut dengan pembangunan infrastruktur pada. Berikut data 3 (Tiga) tahun terakhir untuk jenis kegiatan pembangunan infrastruktur pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada Desa Kesumbo Ampai

No	Jenis Kegiatan Infrastruktur	2020	2021	2022
1	Parit Beton	3 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi
2	Pengerasan Base C	3 Lokasi	3 Lokasi	1 Lokasi
3	Semenisasi Jalan	1 Lokasi	4 Lokasi	3 Lokasi
4	Parit Bata	2 Lokasi	1 Lokasi	
5	Semenisasi Halaman BPD	1 Lokasi	1 Lokasi	
6	Pembangunan MCK	1 Lokasi		1 Lokasi
7	Pembangunan Embung Desa	1 Lokasi		
8	Turap	1 Lokasi		
9	Pondopo	1 Lokasi		
10	Pembuatan Box Culvert	1 Lokasi		2 Lokasi
11	Galian Parit		1 Lokasi	2 Lokasi
12	Pembuatan Jalan Baru			2 Lokasi

Sumber Data: Desa Kesumbo Ampai Tahun 2023

Dari data pada tabel dapat dilihat pembangunan infrastruktur pada Desa Kesumbo Ampai. Penulis mendapatkan informasi dari seorang Staf Kesra dan Kader Teknis Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa Kusumbo Ampai pada 30 Agustus 2022. Jenis kegiatan infrastruktur pada tahun 2022 ada yang tidak sesuai perencanaan dan bahkan ada yang belum terealisasi, seharusnya semua kegiatan pembangunan sudah harus selesai pada Desember 2022.

Kegiatan pembangunan infrastruktur No. 1 pada Tabel 1. tahun 2022 yaitu pembangunan Parit Beton satu dari tiga pembangunannya tidak sesuai dengan yang direncanakan, ukuran awal yang direncanakan yaitu setinggi 80 cm dengan lebar 60 cm, ternyata saat dilapangan tinggi parit yang dibangun 95 cm, ini menunjukkan adanya penambahan tinggi parit beton 15 cm. Hal ini berdampak pada bahan material, panjang parit yang dibangun seharusnya 150 m namun realisasinya tidak sesuai.



Gambar 1. Parit Beton di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai
Sumber : Dokumentasi Penulis, 4 Juni 2023

Gambar 1 merupakan pembangunan parit beton yang sudah dibangun, tidak hanya volumenya yang bermasalah namun juga kondisi parit tersebut yang tidak terawat. Parit yang berisikan tanah dan ditumbuhi rumput liar membuat parit tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan kedua ujung parit beton tersebut tidak memiliki arah atau bentuk aliran sebagaimana bentuk parit pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat serta mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan koordinasi dalam pembangunan Infrastruktur Desa Kesumbo Ampai di Kabupaten Bengkalis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses. Proses koordinasi yang terdiri atas beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi yaitu saling memberi informasi terkait hal tertentu yang melalui rangkaian komunikasi. Sumber informasi (sender) yakni berita tertentu kepada publik atau unit kerja yang lainnya (receiver). Unit kerja yang memiliki kepentingan, langsung menyesuaikan dengan informasi yang diperoleh, atau memberikan feedback kepada masyarakat (Ndraha, 2011:296).

Koordinasi merupakan fungsi dari manajemen. Koordinasi merupakan pekerjaan setiap hari yang dilakukan dari pihak manajemen. Koordinasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi yang besar dan kompleks. Berbagai kegiatan untuk sebuah tujuan selalu hal yang berhubungan. Dengan koordinasi diusakan agar pembangunan yang dilakukan berjalan serasi dan bersinegri (Duadji, 2014:54-55).

Koordinasi suatu jawaban terhadap kepentingan desentralisasi. Dalam upaya perkembangan masyarakat dan usaha pembangunan, pengendalian yang terpusat. Kecendrungan divergensi dalam suatu organisasi yang terpisah,

maka dari itu dibutuhkan koordinasi sebagai suatu alternatif untuk sentralisasi (Duadji, 2014:55)

Hasibuan (2011:85) menjelaskan koordinasi ialah kegiatan mengarahkan, kegiatan mengintegrasikan, dan juga mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan para bawahan/karyawan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Brech dalam Hasibuan (2011:85) memberikan penjelasan bahwa koordinasi adalah mengimbangi dan menajalankan team dengan memberikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang sesuai kepada masing bagian dan menjaga selalu agar kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan semestinya.

Leonard D. White dalam Syafiie (2011:33) menerangkan koordinasi ialah adaptasi diri dari setiap bagian, dan usaha dalam mengerakkan serta mengoperasikan setiap bagian pada waktu yang sesuai, sehingga degan demikian tiap bagian dapat memberikan masukam terbanyak pada hasil.

Terry G. R. dalam Syafiie (2011:34) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan sinkronisasi yang secara teratur dari upaya dalam menciptakan pengaturan waktu secara terpimpin dalam pelaksanaan yang harmonis dan juga bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah sudah ditetapkan. Dengan demikian unsur-unsur koordinasi yaitu usaha sinkronisasi yang teratur, pengaturan waktu yang terpimpin, harmonis dan tujuan yang ditetapkan.

James D. Mooney dalam Syafiie (2011:34) koordinasi, karenanya, adalah susunan yang sudah sistematis dari usaha kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam usaha mengejar tujuan bersama. Dengan begitu unsur-unsur koordinasi yaitu susunan yang teratur, usaha sebuah kelompok, kesatuan dalam tindakan dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Koordinasi menurut Ndraha (2011:291) sebuah proses kesepakatan secara bersama-sama yang akan mengikat berbagai aktivitas kegiatan atau unsur yang berbeda dengan sedemikian rupa sehingga disisi lain semua aktivitas kegiatan atau unsur terarah pada pencapaian sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan dari kegiatan tersebut yang satu tidak mengganggu keberhasilan dari kegiatan yang lainnya.

Pendapat Herlambang (2013:93) Koordinasi merupakan proses pengintegrasian sebuah tujuan dan pelaksanaan kegiatan pada satuan yang terpisah pada sebuah organisasi untuk meraih tujuan dari organisasi secara efesien”.

Hasibuan (2011 : 86-87) dua bentuk/tipe koordinasi yakni koordinasi vertikal dan juga horizontal

- 1) Koordinasi vertikal adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan atasan kepada kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- 2) Koordinasi horizontal adalah pengkoordinasian berbgai tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan untuk tingkat organisasi (aparat) setingkat.

Konsep Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan suatu usaha/upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ditujukan untuk

memperbaiki kehidupan masyarakat luas berupa perbaikan-perbaikan atau perubahan disegala bidang yang mengarah langsung pada indikator kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.

Istilah pembangunan (development) populer pasca Peran Dunia II pada tahun 40 - 60 an. Development digunakan sebagai kerangka berpikir konseptual (conceptual framework) untuk perubahan individual, institusional, nasional serta internasional dan juga untuk kemajuan atau progress (Suprpto, 2019:1).

Pendapat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006:10) menjelaskan pembangunan yang simple/ sederhana dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan ini ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, politik, sosial, atau hukum. Perubahan yang alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan tersebut. Perubahan alami merupakan perubahan yang melembaga dalam bangunan sosial bagi sekelompok manusia.

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri dalam Diddowiseiso (2019:6) dapat diartikan sebagai suatu usaha/upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan suatu alternatif lebih banyak secara legal kepada setiap masyarakat untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Randy dan Nugroho (2006) memberikan definisi bahwa pembangunan yang secara sederhana diartikan sebagai sebuah perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan juga alami. Dalam hal menyelenggarakan tindakan ataupun upaya pembangunan, pemerintah memperhatikan anggaran untuk membiayai kegiatannya tersebut. Dana tersebut yang dihimpun dari warga Negara dalam bentuk pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba dari perusahaan publik.

Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2015 menerangkan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, maupun lunak yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan untuk mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan juga sosial masyarakat dapat berjalan baik.

Pembangunan infrastruktur menurut Sondang P. Siagian (2008) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur suatu usaha atau rangkaian suatu usaha pertumbuhan dan juga perubahan yang dilaksanakan secara terencana untuk membangun sarana dan prasarana atau juga setiap sesuatu yang merupakan bagian dari penunjang terpenting terselenggaranya sebuah proses pembangunan.

Infrastruktur menurut Pangouw Diane dalam Kogoya (2015) menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase bangunan gedung dan fasilitas publik/umum lain yang dibutuhkan untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia dalam ruang lingkup sosial dan ekonomi.

Infrastruktur pembangunan dibagi menjadi atas dua, yang pertama infrastruktur ekonomi, yang diperlukan untuk menunjang aktivitas kegiatan ekonomi, yang meliputi public utilities (listrik, air, gas, sanitasi), public work

(jalan, drainase, bendungan, irigasi) dan bagian sektor transportasi seperti jalan, kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan. Kedua, infrastruktur sosial seperti prasarana sosial berupa infrastruktur pendidikan dan juga kesehatan (Purnomo, 2021)

Konsep Desa

Pengertian dari Desa menurut UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa, Desa merupakan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa menurut Nurman (2015:228) menjelaskan bahwa desa ialah suatu kesatuan masyarakat yang dibentuk berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan RI yang memiliki kewenangan mengatur, mengorganisasi dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Pengertian desa menurut Wasistiono dan Tahir dalam Nurman (2015:226) dilihat dari aspek geografis menjelaskan hasil dari perwujudan antara aktivitas sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari penggabungan itu berupa wujud atau penampakan di muka bumi yang disebabkan oleh unsur fisiografi, politis, ekonomis, sosial dan kultural yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hal hubungannya dengan daerah yang lain.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau eterpretif, yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh lebih kearah data kualitatif, analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2021:9-10).

Penulis mengumpulkan data berdasarkan jenis dan sumbernya dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori menurut Sugiyono (2021:104) yaitu pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu penulis. Seperti data observasi lapangan dan wawancara. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Seperti laporan, dokumentasi, jurnal dan buku.

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh pendapat beberapa ahli yaitu : Observasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Basrowi & Suwandi, 2008:94). Wawancara, penulis menggunakan wawancara semiterstruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugioyono, 2021:115-116). Dokumen, yakni catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen ini bisa berbentuk gambar, tulisan, atau juga berbagai karya monumental. Dokumen berupa tulisan seperti sebuah catatan rutin harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, ceritera, kebijakan dan juga kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar hidup sketsa dan lainnya. Dokumen berupa karya seperti karya seni, bisa berupa gambar, fil, patung, dan lain sebagainya (Sugioyono, 2021:124).

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2017:94) menjelaskan informan ialah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Afrizal (2016:139) menjelaskan informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang dirinya dan juga orang lain atau suatu kejadian ataupun suatu hal kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Informan penelitian ini ialah pihak kecamatan, aparaturnya Desa, BPD, Kepala Dusun dan RT.

Analisis data pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2021:130) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pada Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bentuk dari penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan SDA. Pembangunan dilakukan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Kabupaten/Kota.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur diantaranya meliputi sarana dan juga prasarana seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigrasi. Sedangkan pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Seperti pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan pada bidang ekonomi dan lain sebagainya.

Penulisan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur. Melihat bagaimana koordinasi berjalan baik secara vertikal dan maupun secara horizontal terkait

pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik. Berdasarkan hasil temuan dilapangan adapun faktor-faktor yang menghambat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur/fisik pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis mendapatkan informasi melalui Staf Administrasi Desa yaitu Bapak Inu Purwadi. Beberapa temuan yang penulis dapatkan yaitu:

1. Tidak Adanya Sosialisasi Visi dan Misi Desa Kesumbo Ampai

Visi merupakan suatu mimpi atau sebuah harapan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu, melalui misi harapan tersebut akan mudah dicapai. Oleh karena itu sosialisasi perlu dilakukan untuk mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Desa Kesumbo Ampai memiliki Visi dan Misi namun belum pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Tidak ada, tidak pernah dilakukan penyampain visi dan misi dari Desa ke masyarakat. Tidak pernah melakukan penyampaian terhadap visi misi selama ini. Visi dan Misi dianggap biasa saja. Ada namun sebagai administrasi saja ” (Wawancara, 4 Juni 2023)

Berdasarkan hal tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa belum memberi kesempatan pada masyarakat untuk berperan serta untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Desa. Seharusnya Pemerintah Desa melibatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Desa Kesumbo Ampai.

2. Standar Operasional Belum Terlaksana dengan Optimal

Desa Kesumbo Ampai dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis. Namun aturan tersebut belum terlaksana dengan optimal dan masih terdapatnya kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan oleh bidang-bidang yang ada. Bidang yang seharusnya menjalan tugas dan fungsinya malah menjalan tugas yang bukan ranahnya.

“SOP dipelayanan ada, kalau tidak salah itu Peraturan Bupati, sebagian berjalan sebagian tidak. Ada bidang yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, malah mengerjakan pekerjaan dibidang yang lain, seperti Bidang Pelayanan menjalankan tugas Bidang Kesra. Bantuan dari Pemda seharusnya dikelola oleh Bidang Kesra namun dikelola oleh Bidang Administrasi”. (Wawancara, 4 Juni 2023)

Desa Kesumbo Ampai belum memiliki aturan sendiri terkait pembangunan maupun pelayanan. Namun aturan untuk pelayanan administrasi kependudukan sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2021.

3. Rendahnya Disiplin Kerja

Disiplin merupakan hal yang paling umum terjadinya pelanggaran. Permasalahan disiplin menjadi polemik saat ini. Masih adanya perangkat Desa Kesumbo Ampai yang tidak menyelesaikan bahkan tidak mengerjakan sama sekali pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Selain itu dijumpai Perangkat Desa hadir tidak tepat waktu dan pulang lebih awal. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya sanksi yang diterapkan.

“Tidak ada pengendalian, sanksi tidak ada, pernah mau diterapkan tapi saat rapat yang memimpin rapat bukan Kepala Desa sehingga perangkat tidak

segaran. Kepala desa jarang ditempat karena beliau Pj, makanya yang memimpin rapat itu yang lain". (Wawancara, 4 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami fakat bahwa tidak adanya ketegasan terhadap permasalahan disiplin kerja pada Perangkat Desa Kesumbo Ampai. Jabatan tertinggi yaitu Kepala Desa belum maksimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap bawahannya.

4. Status Kepala Desa Kesumbo Ampai Masih Penjabat

Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Seorang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk atau masyarakat Desa. Pemilihan bersifat langsung, umum, jujur, bebas, dan juga adil. Pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 tahun. Selanjutnya mengenai kebijakan penyelenggara pemilihan seorang Kepala Desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2018 dilaksanakan pemilihan dengan diikuti oleh 8 calon Kepala Desa. Setelah pemilihan dilaksanakan ada calon yang memprovokasi diduga adanya kecurangan membuat beberapa calon Kepala Desa tidak terima dan melakukan demo. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka Kepala Desa ditunjuk.

"Pemilihan Kepala Desa calonnya ada 8 orang, beberapa calon Kepala Desa tidak terima dengan hasilnya, diduga ada kecurangan. Mereka melakukan demo bahkan hampir kelahi. Untuk menghindari hal itu terjadi. Dari Pemerintah Daerah memutuskan menetapkan Penjabat Kepala Desa" (Wawancara, 4 Juni 2023)

Sampai saat ini Kepala Desa masih berstatus Pj. Hal ini membuat Kepala Desa sering tidak ada ditempat sehingga koordinasi tidak berjalan dengan maksimal. Tentunya hal ini berdampak kurang baik terhadap organisasi dan mempengaruhi kinerja dari Pemerintah Desa Kesumbo Ampai.

5. Pengawasan Pembangunan Belum Optimal

Pelaksanaan sebuah kegiatan pembangunan biasanya diawasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim ini dibangun oleh Tim Rencana Kerja Pemerintah, Badan Pemusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan serta mengawasi kegiatan mulai dari awal pembangunan sampai pertanggungjawaban.

Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang mana Ketua Tim adalah Ketua Dusun, sedangkan sekretaris dan anggota dari Rukun Tetangga setempat. Secara tidak langsung pembangunan yang dilaksanakan diawasi oleh Kepala Dusun, Rukun Tetangga dan Masyarakat Desa Kesumbo Ampai.

"kelemahannya itu orang yang berada di Tim TPK kurang paham teknologi sehingga sulit untuk melakukan dokumentasi ... mereka juga punya pekerjaan masing-masing ... terkadang salah mengartikan gambar dan sulitnya dihubungi". (Wawancara, 24 Juli 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kelemahan dari Tim Pelaksana Kegiatan itu sendiri. Seperti belum memahami teknologi, memiliki kesibukan sendiri, tidak memahami konsep yang sudah dibuat dan sulitnya untuk berkomunikasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan tetapi belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ditemukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu tidak adanya sosialisasi Visi dan Misi Desa Kesumbo Ampai, Standar operasional belum terlaksana dengan optimal, rendahnya disiplin kerja, status Kepala Desa yang masih belum definitif dan pengawasan pembangunan belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran dari penelitian adalah Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Kesumbo Ampai agar menjalankan tupoksi sesuai aturan yang ada dan mengelola dengan baik pengarsipan dokumen penting. Rekomendasi kepada masyarakat Desa Kesumbo Ampai agar ikut serta berperan dalam pengawasan pembangunan serta bersama-sama untuk menjaga dan memelihara sapras yang ada.

PENELITIAN LANJUTAN

Dengan kemampuan yang terbatas penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam tulisan ini. Semoga tulisan ini bisa dijadikan sumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi dalam kajian yang sama, dan bisa dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi pembaca atau peneliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan untuk Bapak/Ibu Pimpinan, Tendik dan rekan-rekan yang sudah memberikan dukungan serta masukan terhadap penulis. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi ladang amal yang bermanfaat untuk kita semua kelak diakhirat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, (Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Digdowiseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta: LPU-UNAS
- Duadji, Noverman. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen, Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyrn Publishing.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta

- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Randy & Nugroho. 2006. *Managemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 10-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Desa Bumbung dan Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis